

**LAPORAN KINERJA**  
**2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN & TENGAH**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**TANJUNG**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tahun 2024 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dalam periode Tahun Anggaran 2024. LAKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, serta sebagai umpan balik guna meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung selaku unit kerja vertikal DJP memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (*performance appraisal system*) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Dengan dasar Nilai Kerja Organisasi (NKO) inilah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tahun 2024 dibuat.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tanjung



Ditandatangani secara elektronik  
Mulyono



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II .....	5
PERENCANAAN KINERJA.....	5
BAB III .....	8
AKUNTABILITAS KINERJA .....	8
A. Capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 .....	8
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal .....	9
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi .....	9
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi .....	9
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif.....	10
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif.....	10
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif.....	10
7. Penegakan Hukum yang Efektif.....	11
8. Data dan Informasi yang Berkualitas .....	11
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.....	11
10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	13
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	13
BAB IV .....	14
PENUTUP.....	14

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Visi KPP Pratama Tanjung adalah *“Menjadi penghimpun penerimaan negara yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat demi kedaulatan dan kemandirian bangsa”*. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, KPP Pratama Tanjung mempunyai suatu misi yakni *“Meningkatkan kinerja kantor pelayanan dalam menghimpun penerimaan dengan menggunakan pelayanan berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta memperhatikan budaya dan kearifan lokal yang didukung aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan kompeten”*

Kinerja KPP Pratama Tanjung pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024. NKO KPP Pratama Tanjung Tahun 2024 adalah sebesar 109,38%. Pencapaian NKO ini merupakan hasil kerja keras para pegawai di lingkungan KPP Pratama Tanjung. Semangat, keterbukaan, dan kejujuran adalah kunci keberhasilan yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak semua pegawai di lingkungan KPP Pratama Tanjung sehingga bukan hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai panutan yang memiliki jiwa *“Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan”* bagi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan perpajakannya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung (disingkat KPP Pratama Tanjung) adalah salah satu unit vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menghimpun penerimaan negara dari 3 sektor utama yaitu, Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Perdagangan Besar dan Eceran. KPP Pratama Tanjung dibentuk sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan DJP berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. dan keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP-195/PJ/2008 tanggal 27 November 2008 dan mulai beroperasi tanggal 1 Desember 2008.

KPP Pratama Tanjung merupakan gabungan dan modernisasi dari fungsi pelayanan KPP yaitu pada KPP Banjarbaru yang berkedudukan di kota Banjarbaru, KP4 Tanjung di Kab. Tabalong, KP4 Amuntai di Kab.HSU, fungsi pelayanan PBB yaitu pada KP PBB Tanjung yang berkedudukan di Kab.HST, dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan pajak, yaitu pada Karikpa Banjarmasin.

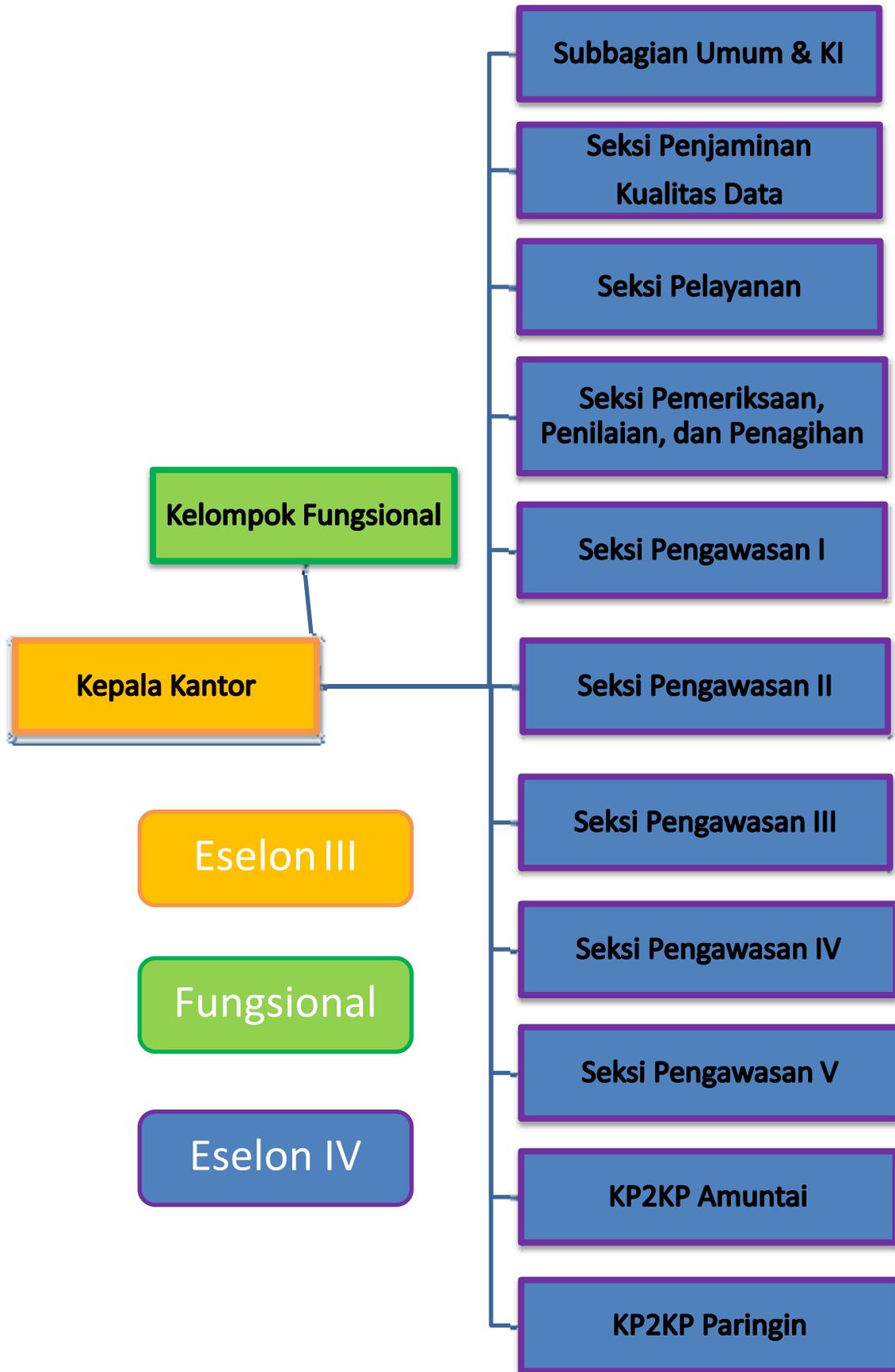
Sebelum reformasi birokrasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung merupakan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (disingkat KP4) Tanjung yang terletak di Jalan I.R. P.H.M. Noor, tepatnya di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong. Terdapat pula Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) Tanjung yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto. Setelah reformasi birokrasi pada tahun 2008, kedua kantor tersebut lalu ditutup, digantikan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung yang terletak di Ruko Swadharma Lestari samping Terminal Mabuun, Tabalong. Selain itu juga didirikan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (disingkat KP2KP) Paringin dan Amuntai.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung per Desember 2024 dioperasikan oleh 76 orang pegawai yang terdiri atas satu orang pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV, 9 orang pejabat fungsional, 20 orang *Account Representative*, serta 35 orang pelaksana struktural yang menempati seksi dan subbagian dalam suatu struktur organisasi serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (1 orang Kepala Subbagian umum dan 10 orang pelaksana)
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data (1 orang Kepala Seksi dan 3 orang pelaksana)

- c. Seksi Pelayanan (1 orang kepala seksi, 1 orang Penyuluh Pajak, 2 orang Asisten Penyuluh Pajak, dan 9 orang pelaksana)
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (1 orang kepala seksi, 1 orang Asisten Penilai Pajak, 2 orang jurusita pajak, dan 4 orang pelaksana)
- e. Seksi Pengawasan I (1 orang kepala seksi, 5 orang *Account Representative*, dan 1 orang pelaksana)
- f. Seksi Pengawasan II (1 orang kepala seksi, 4 orang *Account Representative*, dan 1 orang Pelaksana)
- g. Seksi Pengawasan III (1 orang kepala seksi, dan 4 orang *Account Representative*)
- h. Seksi Pengawasan IV (1 orang kepala seksi, 4 orang *Account Representative*, dan 1 orang pelaksana)
- i. Seksi Pengawasan V (1 orang kepala seksi, dan 3 orang *Account Representative*)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional (5 orang fungsional pemeriksa, 1 orang fungsional penilai, 3 orang fungsional penyuluh pajak)
- k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Amuntai (1 orang kepala KP2KP dan 2 orang pelaksana)
- l. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Paringin (1 orang kepala KP2KP dan 3 orang pelaksana)

**Bagan Organisasi  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung**



Sejalan dengan perkembangan zaman di mana terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dewasa ini menuntut dilakukan adanya perubahan, terutama perubahan dalam pola pikir (*mind set*) dan organisasi untuk menuju sistem pemerintahan yang baik. Begitu pula halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung telah terjadi perubahan dalam struktur organisasinya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung memberikan sumbangsuhnya melalui kegiatan yang dapat menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan dengan berpedoman pada visi dan misi sebagai berikut :

#### **VISI**

---

***"Menjadi penghimpun penerimaan negara yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat demi kedaulatan dan kemandirian bangsa"***

#### **MISI**

---

***"Meningkatkan kinerja kantor pelayanan dalam menghimpun penerimaan dengan menggunakan pelayanan berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta memperhatikan budaya dan kearifan lokal yang didukung aparaturnya yang berintegritas, profesional, dan kompeten"***

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain perencanaan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perencanaan Kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel Target Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%

7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	55,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00

Demi tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, penetapan kinerja KPP Pratama Tanjung Tahun 2024 sangat diperlukan. Penetapan kinerja KPP Pratama Tanjung, terdiri dari program kerja sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
2. Deklarasi Komitmen Integritas Pimpinan
3. Pembuatan Pakta Integritas Pegawai
4. Pemberian Saran dan Usulan untuk Arah Perbaikan
5. Bimbingan Kinerja Atasan Lansung kepada Bawahan
6. Pembuatan Deklarasi Data Pegawai
7. Kegiatan KYE dan KYL
8. Doa Pagi Harian
9. Morning Activity Bulanan
10. Rapat Pembinaan II-b
11. Pemasangan Media Edukasi Kepada Wajib Pajak
12. DJP Bugar
13. Kegiatan Peringatan Hari Besar (Hari Pajak, Kemerdekaan RI, Hari Oeang RI, dan peringatan HAKORDIA)
14. Team Building Internaliasi Corporate Value (ICV)
15. Sosialisasi Gratifikasi kepada Stakeholder dan Pegawai
16. Public Campaign Direktorat Jenderal Pajak
17. Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi
18. Program CERIA

KPP Pratama Tanjung secara konsisten melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk mengedukasi Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak. Program-program ini dirancang agar masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajiban membayar pajak serta turut mengawasi penggunaannya secara optimal di lapangan.

Tidak hanya perhatian yang berfokus pada Wajib Pajak, KPP Pratama Tanjung juga memberikan perhatian khusus pada pihak internal. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pajak, pegawai KPP Pratama Tanjung dituntut untuk menjadi teladan dalam hal kepatuhan pajak. Dengan demikian, seluruh elemen di KPP Pratama Tanjung, baik internal maupun eksternal, dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya sadar pajak yang berkelanjutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,82%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,53
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,60%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	122,48%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,73%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	106,71
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	116,40%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	55,00%	87,03%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,84
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,91
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	120,00

## **1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**

### **a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dari kegiatan PPM tercapai 101,60% atau Rp1.206.549.592.000 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.225.817.529.567. Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dari kegiatan PKM tercapai 102,73% atau Rp306.121.154.079 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp297.997.143.000. Dengan demikian persentase realisasi penerimaan pajak total Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tercapai 101,82% atau Rp1.531.938.683.646

### **b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Dengan menurunnya penerimaan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, KPP Pratama Tanjung mencapai indeks pertumbuhan sebesar 95,53.

## **2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi**

### **a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dari kegiatan PPM tercapai 101,60% atau Rp1.206.549.592.000 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.225.817.529.567.

### **b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 adalah sebesar 41.068 wajib pajak. Dari total tersebut jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan selama tahun 2024 adalah sebesar 43.562. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan formal wajib Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 hanya tercapai sebesar 122,48%.

## **3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

### **a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dari kegiatan PKM tercapai 102,73% atau Rp306.121.154.079 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp297.997.143.000

#### **4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif**

- a. Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Pada tahun 2024 jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara efektif dan dengan memperhatikan perubahan perilaku pelaporan dan pembayaran pajak atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88,80%.

- b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Pada tahun 2024 jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara efektif dan dengan nilai indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mencapai 106,71%.

#### **5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif**

- a. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Jumlah capaian realisasi dafnom STP, data perpajakan, dan dinamisasi PPh pasal 25 wajib pajak strategis mencapai 120%. Begitu juga dengan capaian untuk wajib pajak kewilayahan, sehingga capaian total untuk realisasi pengawasan pembayaran masa Kantor Pajak Pelayanan Pratama Tanjung Tahun 2024 mencapai 120%.

#### **6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif**

- a. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Jumlah capaian penyampaian LHP2DK pada tahun 2024 yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 120,00% dari target yang ditentukan.

- b. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Pemanfaatan data selain tahun berjalan dihitung dengan mengkalkulasi rata-rata capaian pemanfaatan data STP dan capaian pemanfaatan data matching. Karena persentase pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching di tahun 2024 sudah 120%, maka capaian realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tahun 2024 bernilai 120%.

- c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pada tahun 2024 ditentukan target efektivitas pengelolaan komite kepatuhan adalah 100,00%, dan selama tahun 2024 realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu adalah 120,00%.

## **7. Penegakan Hukum yang Efektif**

### **a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

Pada tahun 2024 ditentukan target efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 100,00%, dan selama tahun 2024 realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 120,00% dengan detail data yaitu tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 102,00%, dan tingkat efektivitas penilaian sebesar 120,00%.

### **b. Tingkat efektivitas penagihan**

Pada tahun 2024 ditentukan target efektivitas penagihan adalah 75,00%, dan selama tahun 2024 realisasi efektivitas penagihan adalah 116,40%.

### **c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Pada tahun 2024 ditentukan target penyampaian usul pemeriksaan bukti pemeriksaan adalah 100,00%, dan selama tahun 2024 realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah 120,00%.

## **8. Data dan Informasi yang Berkualitas**

### **a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

Data alat dan keterangan sebagai data acuan untuk menggali potensi pajak telah di rekam dan siap digunakan. Perekaman alket pada tahun 2024 telah dilaksanakan dari pelaksana hingga Account Representative pada aplikasi alket yang telah tersedia, setidaknya ada 351 Alket memiliki lawan transaksi, 307 Alket tidak memiliki lawan transaksi dari total target adalah 400 Alket. Dengan demikian, capaian realisasi persentase penyediaan data potensi perpajakan memiliki nilai 120,00%

### **b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

Capaian persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah 120% dan telah memenuhi target tahun 2024, dengan nilai target 55,00% dan realisasi bernilai 87,03%.

## **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif**

### **a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Capaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,48% dan telah memenuhi target tahun 2024.

### **b. Indeks Penilaian Integritas Unit**

Indeks penilaian integrasi unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tahun 2024 bernilai 95 dari target senilai 85.

- c. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko  
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tahun 2024 bernilai 98,91 dari target senilai 90

## 10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

- a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran  
Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Tanjung sebesar 100.

### Perbandingan realisasi KPP Pratama Tanjung Tahun 2022 - 2024

Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
<b>PPH NON MIGAS</b>	<b>641.326.533.000</b>	<b>471.254.311.919</b>	<b>404.317.016.886</b>	<b>325.663.119.176</b>
1.1 PPh Pasal 21	383.859.725.000	367.614.759.988	290.550.619.028	219.469.276.491
1.2 PPh Pasal 22	100.326.329.000	22.763.815.056	24.165.147.558	19.524.446.140
1.3 PPh Pasal 22 Impor	7.169.000	32.864.577	5.828.325	7.021.045
1.4 PPh Pasal 23	49.663.052.000	22.970.774.918	21.003.183.850	17.819.365.222
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	2.312.626.000	2.458.026.368	4.020.921.234	2.250.404.328
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	4.641.974.000	8.827.157.776	8.642.544.122	8.484.699.699
1.7 PPh Pasal 26	990	42.253.734	9.117.245.078	9.948.930.239
1.8 PPh Final	100.514.668.000	46.544.659.502	46.811.527.691	48.158.976.012
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	-	-	-
<b>PPN dan PPhBM</b>	<b>390.008.283.000</b>	<b>321.709.542.342</b>	<b>265.311.842.498</b>	<b>148.724.654.396</b>
1. PPN Dalam Negeri	389.419.082.000	321.328.125.813	264.438.013.684	148.016.172.489
2. PPN Impor	11.500.000	128.959.606	8.190.616	10.105.177
3. PPhBM Dalam Negeri	382.534.000	237.913.678	457.437.673	290.705.388
4. PPhBM Impor	-	-	-	327.027
5. PPN Lainnya	194.092.000	14.543.245	138.339.337	39.122.657
6. PPhBM Lainnya	1.075.000	-	1.211.188	-
7. PPN DN DTP	-	-	268.650.000	368.221.658
8. PPhBM DTP	-	-	-	-
<b>PBB dan BPHTB</b>	<b>458.498.867.000</b>	<b>723.379.022.729</b>	<b>1.149.240.449.337</b>	<b>113.635.614.299</b>
1. Pendapatan PBB	458.498.867.000	-	-	113.635.614.299
a. PBB Perdesaan	-	-	-	-
b. PBB Perkotaan	-	-	-	-
c. PBB Perkebunan	2.518.689.000	3.107.135.262	3.023.065.594	2.825.121.887
d. PBB Kehutanan	786.141.000	932.875.163	1.663.309.373	287.614.688
e. PBB Pertambangan Minerba	424.362.913.000	687.453.471.108	1.113.675.666.155	80.998.771.103
f. PBB Migas	30.831.124.000	31.885.541.196	30.878.408.215	29.524.106.621
<b>Pendapatan PPh DTP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.646.377.357</b>	<b>11.780.579.555</b>
1. PPh Pasal 21	-	-	1.623.037.571	11.735.813.030
2. PPh Pasal 22	-	-	-	-
3. PPh pasal 22 Impor	-	-	-	-
4. PPh Pasal 23	-	-	-	-
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	-
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	-	-
7. PPh Pasal 26	-	-	-	-
8. PPh Final	-	-	23.339.786	44.766.525
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-	-	-
<b>Pajak Lainnya</b>	<b>14.713.052.000</b>	<b>15.595.806.656</b>	<b>15.288.527.148</b>	<b>14.752.490.971</b>
1. Bea Meterai	201.617.000	122.850.000	186.159.000	322.923.000
2. Penjualan Benda Meterai	14.502.445.000	15.470.500.000	15.094.000.000	14.360.000.000
3. PTLL	8.990.000	1.824.600	8.368.148	29.317.971
4. Bunga Penagihan PPh	-	632.056	-	250
5. Bunga Penagihan PPN	-	-	-	40.000.000
6. Bunga Penagihan PPhBM	-	-	-	-
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	-
8. PIB	-	-	-	-
9. PPN Batu Bara	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.504.546.735.000</b>	<b>1.531.938.683.646</b>	<b>1.835.804.213.226</b>	<b>614.556.458.397</b>

## B. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung pada TA 2024 adalah sebesar Rp 7.167.555.740,00 atau 94.11% dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp 7.616.267.000,00 dengan rincian belanja pegawai adalah Rp 581.682.000 atau 95.22% dari pagu sebesar Rp 610.881.000,00, belanja barang sebesar Rp 6.392.345.240,00 atau 93.84% dari pagu sebesar Rp 6.811.651.000,00 dan belanja modal Rp 193.528.500,00 atau 99.89% dari pagu sebesar Rp 193.735.000,00.

**Tabel**  
**Realisasi Belanja KPP Pratama Tanjung**  
**(dalam rupiah)**

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	[51] BELANJA PEGAWAI	610.881.000	581.682.000	(95.22%)
2	[52] BELANJA BARANG	6.811.651.000	6.392.345.240	(93.84%)
3	[53] BELANJA MODAL	193.735.000	193.528.500	(99.89%)
<b>TOTAL</b>		<b>7.616.267.000</b>	<b>7.167.555.740</b>	<b>(94.11%)</b>

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2024, adanya penerapan langkah efisiensi dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pembatasan pengeluaran biaya perjalanan dinas hingga maksimal 50% dari pagu anggaran yang masih tersisa pada triwulan IV. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta mendorong optimalisasi penggunaan anggaran negara dalam mendukung prioritas pembangunan dan kegiatan operasional yang mendesak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Sebagai suatu instansi vertikal pada DJP yang notabene merupakan salah satu pengelola keuangan dan kekayaan negara sekaligus sebagai penyumbang dana APBN terbesar dari sektor pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif serta timbulnya berbagai opini negatif di kalangan masyarakat mengenai birokrasi perpajakan, tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan bagi wajib pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak, dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diamanatkan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai target yang ditentukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

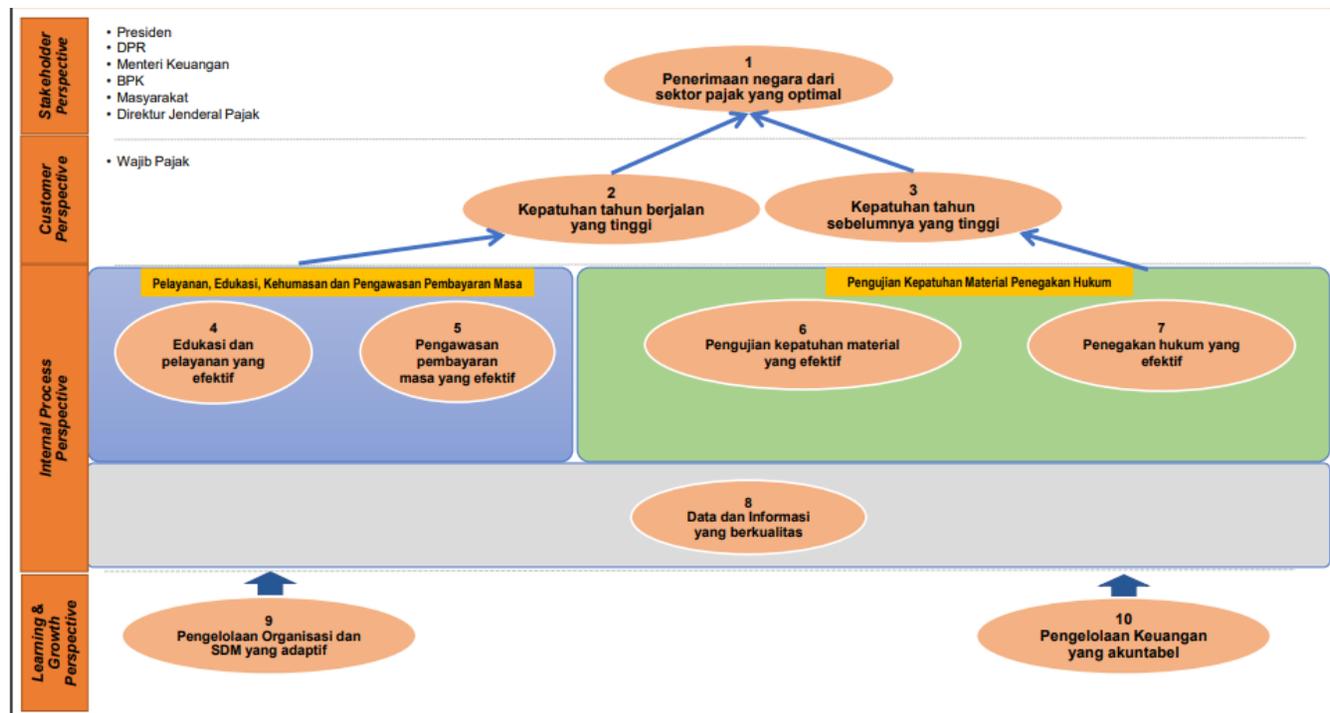


**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-14/WPJ.29/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA****TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN  
SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.464.006.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 682.352.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 272.000.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 509.654.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 6.201.497.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.551.412.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 650.085.000
<b>Total</b>	<b>Rp 7.665.503.000</b>

Tanjung, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan  
Selatan dan Tengah,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Syamsinar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mulyono







Tanjung, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Tanjung,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mulyono



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak yang baru ditetapkan	Output : Pengusaha Kena Pajak mengetahui kewajiban perpajakan sejak awal  Outcome : Kepatuhan pembayaran PPN dan pelaporan SPT PPN	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan dan KP2KP	
2.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Pencanangan dan pelaksanaan STP Day setiap Jumat pekan kedua	Output : Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan sesuai target yang telah ditetapkan	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		dan keempat	Outcome : Wajib Pajak tepat waktu dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT					
3.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Sharing session bedah Wajib Pajak dengan Fungsional dan Account Representative	Output : Meningkatkan kemampuan Account Representative dalam melakukan penggalian potensi  Outcome : Kegiatan pengujian kepatuhan material berjalan efektif dan mampu meningkatkan penerimaan pajak	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
4.	Penegakan hukum yang efektif	Penagihan persuasif dengan prioritas	Output : Penunggak Pajak dapat segera melunasi tunggakan pajaknya	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan	

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Wajib Pajak Penunggak Terbesar, Ketetapan Terbit Tahun 2022 dan 2024	Outcome : Penegakan Hukum berjalan dengan efektif					
5.	Data dan informasi yang berkualitas	Permintaan data ke otoritas pelabuhan dalam rangka mendukung kegiatan pengumpulan data lapangan	Output : KPDL lebih efektif dan tepat sasaran berdasarkan data dari pihak ketiga  Outcome : Data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan KPDL berkualitas dan dimanfaatkan dalam penggalan	Q1: 20% Q2: 50% Q3: 80% Q4: 100%	Q1: 20% Q2: 50% Q3: 80% Q4: 100%	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, dan Seksi Penjaminan Kualitas Data	
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Pembacaan doa dan Morning activity setiap pagi	Output : Pegawai dapat melaksanakan ujian kompetensi dengan hasil yang terbaik serta	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Mengadakan bimbingan belajar persiapan ujian	<p>pegawai dapat termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari</p> <p>Outcome : Organisasi dapat berjalan dengan baik dan berkinerja tinggi dan seluruh pegawai KPP Pratama Tanjung memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai tugas jabatan</p>					
7.	Pengelolaan keuangan yang optimal	Melakukan perencanaan keuangan setiap triwulan	<p>Output : Tercapainya Indikator Kinerja Utama Anggaran Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%</p>	<p>Q1: 25% Q2: 50% Q3: 75% Q4: 100%</p>	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Bendahara	

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			Outcome : Melaksanakan rincian anggaran keuangan secara optimal					

Tanjung, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mulyono



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Mulyono, S.E., M.Si.	NAMA	Syamsinar	
NIP	197207031993011001	NIP	197004141995032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%  100	Penerima Layanan  Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran

10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>

PERILAKU KERJA		
		serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Mulyono  
197207031993011001



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar  
197004141995032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	80 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Mulyono

197207031993011001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar

197004141995032001

